



INTISARI

Berbagai kebijakan telah di keluarkan pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. Khusus di bidang perizinan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006. Untuk menindaklanjutinya Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Dinas Perizinan di Tahun 2008. Di tahun 2009 dinas Perizinan Kabupaten Bantul mengeluarkan produk pelayanan yang disebut perizinan paralel. Dengan adanya produk ini diharapkan pelayanan perizinan menjadi semakin mudah dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi dari produk perizinan paralel serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.

Dalam menilai kinerja sistem pelayanan perizinan paralel di Kabupaten Bantul, penelitian ini menggunakan indikator akses dan produktifitas. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan kinerja sistem perizinan paralel di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul belum berjalan cukup baik. Banyaknya izin yang masuk justru mengakibatkan terbitnya izin menjadi menurun dan SIM Perizinan belum mampu menunjukkan jenis perizinan yang di urus antara perizinan paralel atau pun izin tunggal. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya di bidang teknologi informasi dan keterbatasan sumber daya manusia dengan hanya mempunyai 36 PNS dan 7 pegawai kontrak. Dari aspek komunikasi baik secara intern maupun ekstern sudah cukup baik. Struktur organisasi yang lumayan ramping juga memudahkan koordinasi sehingga mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis- analisis di lapangan dalam kinerja sistem pelayanan perizinan paralel di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, ada faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat. Faktor pendukung yaitu : Komunikasi yang baik, Sosialisasi yang terus menerus dilakukan, Adanya SOP, Adanya Tupoksi yang jelas, Sarana dan prasarana yang memadai, dan Anggaran yang cukup. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat : Kurangnya Sumber Daya Manusia, Belum adanya SOP perizinan Pararel, dan SIM yang belum memadai.

Kata kunci : Perizinan Paralel, Kinerja, Implementasi



Abstract

Various policies have been issued by the government in order to improve public services in Indonesia. Especially in the field of licensing authorities have issued a policy Implementation Services One Stop through the Minister of Home Affairs No. 24 of 2006. To follow up, Bantul Regency form Licensing Agency in 2008. In 2009 official Bantul District Licensing product licensing service called parallel. With this product licensing service is expected to be easier and faster.

This study aims to determine the performance of the product licensing parallel implementation and the factors that affect the performance. In assessing the performance of a parallel system of licensing services in Bantul, this study uses indicators access and productivity. As for the factors that affect it's implementation are communication, resources, and bureaucracy structure

By using kualitatif descriptive approach, the results of this study demonstrate the performance of a parallel licensing system in Bantul District Licensing Agency has not worked well enough. The number of entry permits it resulted in the issuance of licenses to be slower and have not been able to demonstrate a SIM Licensing licensing types in the care of licensing parallel or single license. This is due to limited resources in the field of information technology and human resource limitations of having only 36 civil servants and contract employees 7. From the aspect of communication both internally and externally is good enough. Fairly lean organizational structure also facilitates coordination so as to support the organization's performance.

Based on the analyzes in the field in the performance of parallel systems to permit service in Bantul District Licensing Agency, there are factors that support and also the factors that hamper. Supporting factors are: Good communication, socialization are continuously performed, existence of SOPs, Auth existence of a clear, adequate facilities and infrastructure, and sufficient budget. While the inhibiting factors: Lack of Human Resources, yet SOP licensing parallel, and the SIM is not adequate.

Key word : Pararell licensing, performance, implementation